

**PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN
SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

ICHSAN PRATAMA RIVANDI

NIM. 2220122027

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum Pembimbing I

Dr. Hengki Andora, S.H.,L.LM Pembimbing II

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

*Ichsan Pratama Rivandi, 2220122027, Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024.*

ABSTRAK

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten dengan luas lahan pertanian terbesar keenam di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas tanah sawahnya sebesar 14,090 Hektar yang semakin hari luas tersebut berkurang karena banyaknya peralihan hak atas tanah. Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah kepemilikan tanah pertanian secara *Absentee* masih dapat dijumpai sampai sekarang, meskipun pemilikan tanah pertanian secara *Absentee* dilarang, tetapi sampai saat ini berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, masih dijumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara *Absentee*. Penelitian ini mengajukan rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimanakah penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat pendaftaran pertama kali di Kantor Pertanahan Lima Puluh Kota? 2. Bagaimanakah penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada saat peralihan Hak Milik atas tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)? 3. Bagaimanakah penanggulangan kepemilikan tanah secara *Absentee* jika tanah pertanian tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa: 1. Penanggulangannya adanya upaya yaitu penertiban hukum dengan mengadakan penyuluhan hukum yang terarah. Penyuluhan ini diadakan dengan datang kelapangan untuk mengumpulkan atau memantau keadaan inventarisasi ke daerah-daerah yaitu memantau seperti di kecamatan-kecamatan, dimana kecamatan merupakan sentral dari pada peralihan hak supaya tidak dilakukan jual beli tanah secara *Absentee*. 2. Tanggungjawab PPAT untuk meminimalisir praktek pengalihan hak atas tanah yang akan terkena *Absentee* yaitu monitoring terhadap pemindahan hak atas tanah pertanian serta membenahan Administrasi seperti berkoordinasinya kantor badan pertanahan kabupaten Lima Puluh Kota dengan PPAT setempat dalam melakukan peralihan hak atas tanah dalam segala bentuk administrasi atau persyaratan yang terkait dengan objek tanah yang akan dialihkan serta identitas para pihak. 3. Penanggulangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota menyarankan kepada masyarakat untuk melakukan jual beli tanah dihadapan PPAT dan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan syarat yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Pemberian Ganti Kerugian.

Kata Kunci: Penanggulangan, *Absentee*, Pendaftaran Tanah, Peralihan.

COUNTERMEASURES ABSENTEE OWNERSHIP OF AGRICULTURAL LAND ABSENTEE OWNERSHIP OF AGRICULTURAL LAND IN FIFTY CITIES

*Ichsan Pratama Rivandi, 2220122027, Master of Notary, Faculty of Law,
Andalas University, 2024*

ABSTRACT

Fifty Cities Regency is the regency with the sixth largest agricultural land area in West Sumatra Province. With an area of 14,090 hectares of paddy fields, the area is decreasing day by day due to the many transfers of land rights. The reality that occurs in the field is that Absentee ownership of agricultural land can still be found until now, even though Absentee ownership of agricultural land is prohibited, but until now based on data at the Land Agency Office of Fifty Cities Regency, there is still Absentee ownership of agricultural land. This research proposes the formulation of the problem, namely: 1. How is Absentee Land Ownership handled during the first registration at the Land Office of Fifty Cities? 2. How is Absentee Land Ownership handled during the transfer of Land Ownership Rights before a Land Deed Official (PPAT)? 3. How to overcome Absentee land ownership if the agricultural land is not registered at the Land Agency Office of Fifty Cities Regency? This research uses an empirical juridical approach method. The results of the study found that: 1. The countermeasure is the effort of law enforcement by conducting directed legal counseling. This counseling is held by coming to the field to collect or monitor the state of inventory to the regions, namely monitoring such as in sub-districts, where the sub-district is the center of the transfer of rights so that the sale and purchase of land in Absentee. 2. The responsibility of the PPAT to minimize the practice of transferring land rights that will be affected by Absentee is monitoring the transfer of agricultural land rights and improving administration such as coordinating the Fifty Cities district land agency office with local PPATs in transferring land rights in all forms of administration or requirements related to the land object to be transferred and the identity of the parties. 3. Countermeasures from the Fifty Cities District Land Agency advise the public to sell land before a PPAT and register the land with the Fifty Cities District Land Agency with the conditions specified in Government Regulation 224 of 1961 concerning the Implementation of the Distribution and Provision of Compensation.

Keywords: Countermeasures, Absentee, Land Registration, Transision.